



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUHARTOYO**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **166346**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.486.585.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m²/150 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 608.350.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1225 m²/256 m² di KAB / KOTA KOTA METRO , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m²/152 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 334 m²/54 m² di KAB / KOTA LAMPUNG TENGAH, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 350.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 398 m²/54 m² di KAB / KOTA KOTA METRO , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m²/105 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 678.015.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 373 m²/332 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.220.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m²/200 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **700.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA HARDTOP JEEP Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, JEEP WILYS JEEP Tahun 1960, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000



3. MOBIL, ALPHARD TIPE G Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
550.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	188.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.920.548.053
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	11.295.133.053
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.295.133.053

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.